

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi impian dan cita-cita sebagian besar masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Manusia memiliki banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam upaya melaksanakan kesejahteraan sosial yang merupakan sesuatu yang jarang dapat dimaknai dengan benar oleh masyarakat. Pengertian kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2014:1) sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan sosial yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh Lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial adalah merupakan aktivitas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan-

baik dari pemerintahan maupun swasta dengan sasarannya terhadap pemecahan masalah yang ditinjau dari fisik, mental, dan lingkungan yang ada pada kehidupan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun masyarakat demi keadaan yang lebih baik.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Individu, kelompok, dan masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka dalam situasi terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan psikis seperti rasa aman, cinta, dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini adalah suatu keadaan dimana orang-orang bisa melaksanakan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan kedudukannya. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dikutip dalam (Fahrudin, 2014:9) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi sosial yang terorganisasi, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan, serta hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang memuaskan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan penuh mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat

Berdasarkan kutipan di atas, tujuan kesejahteraan sosial yaitu di antaranya berfokus pada pencapaian kehidupan pokok manusia yang mencakup kebutuhan-

fisik, ekonomi, sosial serta penyesuaian diri terhadap taraf hidup yang layak bagi kehidupannya.

2.1.2 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan-tujuan yang tercakup dalam pengertian-pengertian kesejahteraan sosial adapun tujuan lain di dalam kesejahteraan sosial secara khusus dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014:10) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kutipan diatas menyatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggalii sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Undang- Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti, sandang, pangan, papan, kesejahteraan, Pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat.

Penjelasan yang kedua adalah mengembalikan keberfungsian sosial di dalam masyarakat, dimana sebelumnya memiliki masalah sosial. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosial pada saat mempunyai masalah, dan masalah tersebut bisa di tangani, penjelasan keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan peduli kepada orang-orang yang mempunyai masalah sosial untuk ditangani, penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masalah yang mempunyai masalah sosial.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi sosial negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlender dan Apte dalam (Fahrudin, 2014:12) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut adalah:

- a. Fungsi Pencegahan (*preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

- c. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*Support*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

2.2 Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial ditafsirkan sebagai ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.

2.1.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial problema perbedaan antara yang *dass saollen* (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan) dengan *dass sein* (yang nyata, yang terjadi). Dengan kata lain, masalah ada perbedaan antara yang ideal dan real. Masalah juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak

mengenakan karena terjadinya perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, kelompok maupun dengan masyarakat. Masalah sosial menurut Soetarno dalam (Huraerah, 2011:4):

Masalah sosial merupakan kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan sangat sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang yang menilainya tidak sebagai masalah.

Dari penjelasan diatas, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak mengenakan yang dialami oleh setiap orang. Besar atau kecilnya suatu permasalahan tergantung dari individu yang menghadapi dan menyelesaikannya. Masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan tidak bisa terselesaikan tanpa adanya usaha yang maksimal dalam penyelsaiannya.

Setiap manusia memiliki berbagai macam pandangan tentang masalah, baik masalah individu, kelompok, maupun masyarakat. Karena masalah itu muncul karena adanya perbedaan pandangan atau persepsi. Masalah sosial menurut Kartini Kartono dalam (Huraerah, 2011:4) mempunyai pandangan tentang masalah sosial, di antaranya adalah:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan istiadat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besat dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrolan dan nilai sanksional terhadap tingkah laku terhadap anggota masyarakat. Oleh karena itu, tingkah laku dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat istiadat karena di anggap sebagai suatu masalah sosial.

Masalah sosial mempunyai beberapa komponen, komponen tersebut di kemukakan oleh Parillo yang dikutip oleh Soetomo dalam (Huraerah, 2011:5) yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari suatu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan atau kepecahan.

Masalah sosial menimbulkan kerugian baik secara jasmani maupun rohani. Karena jika kita mempunyai masalah sosial akan berdampak negatif untuk diri kita maupun untuk masyarakat dan dengan adanya masalah sosial kita akan sulit mencapai suatu kesejahteraan.

Menurut Horton dan Leslie dalam (Suharto, 2007:82) mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut : “suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang.

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.

Menurut paham hedonism, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan.

Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan.

Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Uraian diatas menjelaskan bahwa karakteristik masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh banyak orang. Seseorang akan mengalami suatu ketidaknyamanan, rasa tidak menyenangkan, dan kondisi seperti itu membutuhkan suatu penyelesaian. Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan melalui rekayasa sosial. Seperti aksi sosial, kebijakan sosial, perencanaan sosial. Karena masalah sosial tersebut bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.3 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan purna Tenaga Kerja Wanita merupakan tempat dimana menampung kegiatan pelatihan yang fungsinya untuk memberikan dan mengembangkan ketrampilan, produktivitas, dan disiplin. Dengan adanya pelaksanaan pemberdayaan ini diharapkan bisa terciptanya masyarakat yang terampil dan berkualitas sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, selain-

itu masyarakat diharapkan dapat berwirausaha secara mandiri dan bisa mengembangkan potensinya

2.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memberikan tekanan pada individu dalam pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta aspek-aspek lainnya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Pemberdayaan memiliki unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan 16 kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek. Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut parsons yang dikutip dalam (Suharto, 2014:58-59) yaitu:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

Pemberdayaan masyarakat dikatakan sebagai serangkaian proses yang menghasilkan masyarakat ikut andil dalam penerapannya, dapat mengawasi, dan berpengaruh bagi sekitar yang membutuhkan perannya. Semua itu didapatkan apabila masyarakat sudah mendapatkan ketrampilan, pengetahuan, dan kuasa yang akan memiliki pengaruh bagi diri dan sekitarnya. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai proses, adapun menurut (Huraerah, 2011:87) sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki *goal* terhadap kemandirian masyarakat itu sendiri. Maka dengan berbagai proses yang telah dilalui akan membantu menemukan solusi, penyelesaian terhadap masalah bahkan diberi pemahaman mengenai pemanfaatan kemampuan yang dimiliki akan menjadi suatu kekuatan bagi masyarakat sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Dubois dan Miley dalam (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007:116) menjelaskan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi:

1. Proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama.
2. Memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3. Klien harus merasa sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi.
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup.
5. Melalui jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas, untuk menggunakannya secara efektif.
6. Sinergis, dinamis, evolusioner, dan memiliki banyak solusi.

7. Pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Menurut Saraswati dalam (Alfitri, 2011:24) pemberdayaan harus memenuhi enam hal berikut:

1. *Learning by doing*
Pemberdayaan adalah proses belajar, dan terdapat tindakan konkrit yang kontinyu dan dampaknya apat terlihat.
2. *Problem solving*
Pemberdayaan harus memberikan pemecahan masalah krusial pada waktu yang tepat.
3. *Self evaluation*
Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat melakukan evaluasi secara mandiri.
4. *Self development and coordination*
Pemberdayaan agar mendorong pengembangan diri dan melakukan koordinasi dengan pihak lain secara luas.
5. *Self selection*
Pemberdayaan menumbuhkan kemandirian dalam menetapkan langkah kedepan.
6. *Self decisim*
Pemberdayaan membuka kesadaran untuk memilih tindakan yang tepat dengan percaya diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Menurut (Isbandi Rukmianto Adi, 2008), upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam masyarakat.
- b) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang telah sukses dan sejahtera.
- c) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang prospektif secara sistematis tentang hakekat dan penyebab dari masalah berbisnis.
- d) Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat dimanfaatkan.

2.3.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Suharto, 2014:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan, potensi, harapan, masalah yang ada di dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama dengan partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berbeda pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, sedangkan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel

Berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat yang berlaku dan di jadikan acuan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak dapat

melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. pembedayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat bukan hanya dialami oleh masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki usaha atau kehidupannya bergantung pada gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya, maka dibutuhkan sebuah bantuan untuk pembangunan, ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan dan tidak berdaya akan menggali potensi yang dimiliki mereka dan mempermudah melakukan aktifitasnya.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat

d. Bantuan Kelembagaan

Keberadaan sebuah Lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu aspek yang penting untuk menciptakan suatu keberdayaan. Dengan adanya suatu Lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi. Karena fungsi Lembaga itu sendiri untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memberikan akses-akses yang dibutuhkan seperti modal, dan lain lainnya.

Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan suatu yang penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat kemajuan kualitas hidup masyarakat yang awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri.

2.3.3 Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses merupakan serangkaian tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, elemen-elemen kemasyarakatan. Tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan menurut (Isbandi Rukmianto Adi, 2008:54) terdapat 7 tahapan persiapan, yaitu:

- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan Pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- c. Tahap Perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap Pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap Pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
- f. Tahap Evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap Terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap tertentu yang dimulai dengan tahap yang membantu masyarakat mengemukakan masalah, di dalamnya diberikan perubahan kepada pemikirin masyarakat sasaran agar mereka menyadari adanya masalah, kemudian melakukan kajian terhadap masalah yang telah ditemukan mana yang paling cocok di atasi terlebih dahulu. Tahap lainnya yaitu melakukan perencanaan atas masalah yang akan diselesaikan, termasuk di dalamnya perencanaan program, lalu masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan, bantuan. Tahap terakhir yaitu masyarakat yang telah mengikuti proses pemberdayaan diberikan kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai dengan kemampuannya, mengevaluasi dengan kebaikan kualitas selanjutnya.

2.3.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan menurut (Suharto, 2014:67-68) yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu:

1. **Pemukiman:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.3.5 Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan

Rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemberdayan seperti pemerintahan daerah setempat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusat Layanan usaha Terpadu (PLUT) dan Bank penyalur KUR TKI di tiap desa yang bersangkutan merupakan kegiatan pemberdayaan yang berproses dan bertujuan untuk mengentaskan perekonomian purna buruh migran perempuan. Menurut (Suharto, 2014) bahwa “Sebagai proses pemberdayaan mantan buruh migran perempuan dilakukan dengan rangkaian kegiatan seperti pelatihan bisnis, konsultasi bisnis, mentoring bisnis, fasilitasi dan promosi, akses pembiayaan, dan pemasaran produk. Sebagai tujuan seluruh Lembaga pemberdaya yang terlibat memiliki tujuan agar mantan buruh perempuan mampu berwirausaha secara mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik”.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang dinyatakan oleh (Fahrudin, 2009) diketahui bahwa prinsip-prinsip yang dipegang para lembaga pemberdaya sebagai berikut:

1. Adanya kolaborasi antara mantan buruh migran perempuan dan para lembaga pemberdaya untuk menjadi mitra.
2. Para pemberdaya memiliki peranan penting karena mampu memberikan akses dan peluang yang lebih baik.
3. Para pemberdaya memiliki keyakinan bahwa mampu mempengaruhi perubahan positif terhadap kegiatan bisnis, yang selanjutnya diyakini oleh mantan buruh migran bahwa memiliki kemampuan untuk membawa perubahan secara bersama.
4. Lembaga pemberdaya memainkan peranannya masing-masing sesuai dengan bidang yang dikuasainya, seperti halnya migrant care konsentrasi terhadap penguatan kelembagaan kelompok usaha, pembukaan akses ke lembaga lain. Contohnya PLUT memainkan perannya sebagai lembaga pelatihan, mentoring, pendampingan dan konsultasi bisnis.
5. Pemecahan masalah kegiatan usaha didasarkan pada hasil analisis lintas sektoral yang sudah mengkaji berbagai faktor yang mengakibatkan suatu masalah.
6. Para Pemberdaya mencari jaringan informal seperti asosiasi UMKM, Forum UKM Online, dan Mitra PLUT.
7. Adanya dorongan untuk berperan aktif dari mantan buruh migran perempuan sebagai pihak yang diberdayakan dalam kegiatan usaha, sehingga pencapaian tujuan dan hasil merupakan sesuatu yang didapatkan secara mandiri.
8. Pemberdaya melakukan pemahaman secara mendasar bahwa proses keberhasilan dari pemberdayaan kewirausahaan lebih ditekankan kepada kesadaran mantan buruh migran perempuan untuk berumah.
9. Proses dan tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai lembaga dimaksudkan agar para mantan buruh migran mendapatkan suatu kemampuan dan pengetahuan dari berbagai lembaga pemberdaya, yang selanjutnya dapat diimplementasikan oleh mantan buruh migran perempuan.
10. Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh para pemberdaya merupakan proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah dan berevolusi, karena permasalahan memiliki berbagai alternatif solusi.
11. Harus diakui bahwa pemberdayaan kewirausahaan yang dilakukan terhadap mantan buruh migran perempuan memerlukan sumber daya-sumber daya dari mantan buruh migran untuk digunakan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Pada prinsip ini pemberdaya dan yang diberdayakan mesti mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Strategi pemberdayaan pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu:

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Strategi pemberdayaan memiliki sifat dasar atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mudah diterimadan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola atau *acceptable*
2. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan atau *accountable*
3. Memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis atau *profitable*, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat atau *sustainable*.
4. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas atau *replicable*.

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain dari luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan dalam tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:

1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas- tugas kehidupannya.

2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dalam sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.
3. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.4 Tinjauan Tentang Kewirausahaan

Pada hakikatnya setiap insan telah tertanam jiwa wirausaha yang berarti memiliki kreativitas dan mempunyai tujuan tertentu, serta berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Kewirausahaan menurut (Rusdiana, 2014) adalah:

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya.

Pengertian wirausaha menurut (Suryana, 2014:10) yaitu: “Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut.

Keberanian mengambil risiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian dipasar. Peran dari seorang wirausaha memiliki dua peran-yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Sebagai penemu wirausaha menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya

2.4.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Wirausaha

Menurut (Suryana, 2014:108), keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu yang mencakup hal-hal berikut:

1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan.
2. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras, tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses.
3. Kesempatan dan peluang. Ada solusi ada peluang, sebaliknya tidak ada solusi tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang

itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita.

Menurut (McClelland, 2009) menggolongkan dua faktor yang menentukan keberhasilan wirausaha, antara lain:

1. Faktor Internal, meliputi:

- a. Motivasi keberhasilan kerja membutuhkan motif-motif untuk mendorong atau memberi semangat dalam pekerjaan. Motif itu meliputi motif untuk kreatif dan inovatif yang merupakan motivasi yang mendorong individu mengeluarkan pemikiran spontan dalam menghadapi suatu perubahan dengan memberi alternatif yang berbeda dari yang lain. Motif lain yaitu motif untuk bekerja yang ada pada individu agar mempunyai semangat atau minat dalam memenuhi kebutuhan serta menjalankan tugas dalam pekerjaan.
- b. Pengalaman atau pengetahuan ketika seseorang bekerja pastinya membutuhkan pengetahuan lebih mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya. Sedangkan pengalaman muncul setelah individu tersebut mencari tahu mengenai pekerjaan yang dia kerjakan sebanyak mungkin. Wirausaha yang berpengalaman jeli melihat banyak jalan untuk mengembangkan potensi usahanya.
- c. Kepribadian kepribadian yang rapuh akan berdampak negatif terhadap pekerjaan. Pribadi yang berhasil yaitu apabila seseorang dapat berhubungan baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar dan efektif.

2. Faktor Eksternal, meliputi:

- a. Lingkungan keluarga Keadaan keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan usaha seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga akan menurunkan produktivitas kerja seseorang. Lingkungan keluarga yang harmonis dalam interaksinya akan membantu memotivasi kesuksesan dan meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Lingkungan tempat bekerja Lingkungan tempat dimana seseorang menjalani usahanya mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam menjalankan usaha. Lingkungan ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:
 - Situasi kerja secara fisik Seorang wirausaha dapat menciptakan pekerjaannya dalam situasi apapun melalui bakat dan keterampilan yang dimiliki terutama dalam mencari peluang atau mengambil inisiatif agar usahanya bisa maju.
 - Hubungan dengan mitra kerja Menjaga hubungan baik dengan teman kerja yang merupakan mitra akan mempermudah dalam mendukung atau memotivasi untuk dapat menyelesaikan konflik dengan baik merupakan sesuatu yang mendasar dalam pekerjaan.

Tabel 2.1 Pembentuk Orientasi Enterpreneur Dan Spirit Enterpreneur

Pembentuk Orientasi Enterpreneur	Pembentuk Spirit Enterpreneur	Keterangan
Otonomi (kemandirian)	<i>Locus of Control</i> Internal Kemandirian	Jiwa/spirit entrepreneurial dibentuk oleh sikap kemandirian dan kendali diri (<i>locus of control</i>) internal yang mantap.
Sikap Inovatif	Kreativitas dan Inovasi	Kreativitas dan inovasi merupakan faktor penentu keberhasilan dalam dunia bisnis
Sikap Proaktif	Perencanaan	Adanya perencanaan dan sikap proaktif akan menjamin kesuksesan dan keunggulan dalam banyak aspeknya
Pengambilan Resiko	Pengambilan Resiko moderat	Berani menghadapi resiko yang telah diperhitungkan merupakan sikap cermat dan cerdas dalam bersaing.
Sikap Berani dan Bersaing Agresif	Pengejaran prestasi	Pencapaian prestasi dalam persaingan yang makin ketat menjadi tujuan utama para entrepreneur

Sumber: Suryana & Bayu (2011:112)

Jadi, kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras dan keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang.

2.4.2 Karakteristik Wirausaha

Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer dalam (Suryana, 2014) terdapat delapan karakteristik kewirausahaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Rasa tanggung jawab (*desire for responsibility*), yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya, Memiliki risiko yang moderat (*preference for moderate risk*), yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
2. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (*confidence in their ability to success*), yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan.
3. Menghendaki umpan balik segera (*desire for immediate feedback*), yaitu selalu menghendaki adanya unsur timbal balik dengan segera, ingin cepat berhasil.
4. Semangat dan kerja keras (*high level of energy*), yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
5. Berorientasi ke depan (*future orientation*), yaitu berorientasi masa depan dan memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.
6. Memiliki kemampuan berorganisasi (*skill at organization*), yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
7. Menghargai prestasi (*value of achievement over money*), yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang.

2.5 Tinjauan Tentang Pekerja Sosial Industri

2.5.1 Definisi Pekerjaan Sosial Industri

Fungsi dan peran bagi profesi pekerjaan sosial memiliki relevansi dalam meningkatkan kemampuan dan keberfungsian baik sebagai individu, keluarga, kelompok maupun sebagai suatu masyarakat, lebih khususnya peran pekerja sosial industri. Tugas utama yaitu melaksanakan pelayanan kemanusiaan baik pada setting lembaga, maupun masyarakat (misalnya menjadi pengembang masyarakat atau yang menyelenggarakan program-program pemberdayaan komunitas lokal).

Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antar individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja. Menurut NASW (1987) dalam (Suharto, 2009) pekerja sosial industri adalah:

Menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pekerja Sosial Industri (PSI) menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan. Sebagaimana dinyatakan Akabas dalam (Suharto, 2009:7) inti PSI meliputi: “Kebijakan, perencanaan, dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerjaan sosial dan dunia kerja”. Diantara berbagai kegiatan PSI antara lain adalah program bantuan bagi pegawai,

promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan affirmative (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja. Menurut (Suharto, 2009:8) tugas utama pekerja sosial industri adalah:

Menangani masalah kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, serta perencanaan dan pengorganisasian program-program pengembangan masyarakat bagi komunitas yang ada disekitar perusahaan.

Banyak pelayanan sosial di tempat kerja yang diberikan PSI berkisar pada domain fungsi-fungsi pekerjaan sosial tradisional, seperti konseling bagi para karyawan atau pegawai. Tetapi, semakin canggihnya pendidikan pekerjaan sosial dalam bidang industri, ekonomi, perencanaan, dan analisis kebijakan, asesmen keorganisasian, penelitian, pengembangan masyarakat, membuat pekerjaan sosial semakin mampu berkiprah dalam bidang industri yang bersifat non-tradisional, seperti pengembangan SDM dan organisasi, tanggungjawab sosial dan filantropis perusahaan, serta perencanaan pelayanan sosial perusahaan. Dengan demikian, seperangkat pengetahuan pekerjaan sosial yang begitu luas berpadu dengan kebutuhan kompleks tempat kerja, serta dengan meningkatnya individu yang bekerja di dunia bisnis yang memilih pekerjaan sosial sebagai “karir kedua”, telah meningkatkan peran PSI di dunia kerja.

2.5.2 Tugas Pekerjaan Sosial Industri

Pekerja sosial industri telah memberikan kontribusi dalam memansuiawikan dunia kerja. Pekerja sosial umumnya memberikan konseling di dalam maupun di luar perusahaan, pengorganisasian program-program personal, konsultasi dengan manajemen dan serikat-serikat kerja mengenai konsekuensi kebijakan perusahaan terhadap pekerja, dan bekerja dengan bagian kesehatan dan kepegawaian untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja, serta menangani kebijakan sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Permasalahan sosial lainnya yang sering ditangani pekerja sosial adalah: diskriminasi di tempat kerja atau tindakan-tindakan tidak adil teradap wanita, kaum minoritas, imigran, remaja, pensiunan, dan para penyandang cacat. Beberapa industri dan perusahaan juga sering menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya, seperti polusi (udara, air, tanah, suara) dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawainya. Para pekerja sosial dapat membantu dunia industri untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai biaya sosial (*social cost*) yang ditimbulkan oleh perusahaan, serta memberikan program bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.

2.5.3 Bidang Garapan Pekerjaan Sosial Industri

Guna mengenal lebih jauh fungsi dan peranan pekerjaan sosial, di bawah ini disajikan beberapa contoh bidang garapan atau setting utama yang sering kali menjadi tempat berkiprah para pekerja sosial yaitu antara lain:

1. Keluarga dan pelayanan anak: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak, dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental. Rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, harm reduction programmer.
3. Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketetangaan, perawatan lingkungan hidup, kehutanan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.
4. Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, social fund, JKSM, jaringan pengamanan sosial.
5. Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan: manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.
6. Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan. Pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.
7. Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stress, dan burnout, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responbility*)

2.5.4 Masalah yang ditangani Pekerja Sosial

Berawal dari abad ke-14 di Inggris, masyarakat industri sangat ditentukan sistem pabrik. Pada zaman merkantilisme ini, pada awalnya laki-laki dan wanita bekerja di ladang atau pada perusahaan-perusahaan keluarga (informal). Hal ini memisahkan orang dewasa yang sebagian besar waktunya bekerja di pabrik dengan anak-anak yang ditinggalkan di rumah bersama keluarga besar atau tanpa pengawasan sama sekali. Pemisahan ini menjadi awal bagi dinamika keluarga dan masyarakat termasuk bagi munculnya permasalahan sosial yang diakibatkannya. Retaknya relasi sosial antara pekerja dan keluarganya, kurangnya kesempatan anak dalam meniru model peranan orangtua dan munculnya alinasi atau keterasingan pekerja dalam kehidupan masyarakatnya adalah beberapa contoh masalah sosial yang timbul akibat industrialisasi.

Mekanisme dan otomatisasi melahirkan rutinitas pekerjaan dan membuat tenaga manusia tampak semakin tidak penting. Para pekerja kerah biru maupun

kerah putih merasa tidak bermakna dan terancam karena kapan saja dapat digantikan oleh saingannya, yakni mesin. Perubahan teknologi, penggantian tenaga kerja (*shift*), dan pemutusan hubungan kerja yang semakin menjadi fenomena dalam kehidupan sehari-hari sering menimbulkan kecemasan bagi para pekerja. Proses otomatisasi di AS menggantikan sekitar 2 juta pekerjaan setiap tahunnya. Para pekerja yang merasa tidak berguna dan tidak berdaya dalam pekerjaannya seringkali membawanya ke rumah dan masyarakat. Johnson dalam (Suharto, 2009) mengklasifikasikan akibat akibat industrialisasi yang bersifat negatif terhadap kesejahteraan manusia ke dalam 5A yaitu:

- a. *Alienation*: perasaan keterasingan dari diri, keluarga, dan kelompok sosial yang menimbulkan apatis, marah, dan kecemasan.
- b. *Alcoholism* atau addiction: ketergantungan terhadap alkohol, obat-obat terlarang atau rokok yang dapat menurunkan produktivitas, merusak kesehatan fisik dan psikis, dan kehidupan sosial seseorang.
- c. *Absenteeism*: kemangkiran kerja atau perilaku membolos kerja dikarenakan rendahnya motivasi pekerja, perasaan-perasaan malas, tidak berguna, tidak merasa memiliki perusahaan, atau sakit fisik dan psikis lainnya.
- d. *Accidents*: kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi pekerja atau oleh lemahnya sistem keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
- e. *Abuse*: bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak-anak atau pasangan dalam keluarga (istri/suami), seperti memukul. Dan

menghardik secara berlebihan yang ditimbulkan oleh frustrasi, kebosanan, kelelahan di tempat pekerjaannya.

2.5.5 Pekerja Sosial & Pembangunan Kesejahteraan

Berkaitan dengan Pembangunan kesejahteraan sosial terdapat sub-bagian keprofesian yang disebut dengan Pekerja Sosial Industri (*Social Worker Industry*). Kemunculan profesi ini dilatar belakangi oleh industrialisasi di beberapa Negara maju. Di Eropa, bidang ini muncul pada tahun 1920-an. Pelayanan sosial di dunia industri muncul pada Abad Pertengahan. Industri-industri rumah pada masa itu diasosiasikan dalam bentuk gilda (*guild*).

Di Amerika Serikat, pekerja sosial industri pada mulanya dipekerjakan pada pabrik-pabrik tekstil di bagian selatan, di perusahaan International Harvester dan *National Cash Register*. Mereka melakukan dan atau mengorganisir beragam pelayanan sosial yang meliputi pendirian kamar-kamar istirahat dan kebersihan, perbaikan sanitasi, penyediaan tenaga medis, serta penyediaan makanan, perumahan dan sekolah. Mereka juga mengatur program-program jaminan sosial dan keamanan, pengadaan perpustakaan, kursus menjahit dan memasak, dan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK).

Menurut (Suharto, 2009) definisi PSI ini sebagaimana disampaikan bahwa PSI adalah,

lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Shulamith L. A. Straussner yang dikutip oleh (Suharto, 2009) bahwa terdapat lima tipologi model dalam setting Pekerjaan Sosial Industri ini, yaitu:

1. *The Employee Service*, yaitu perencanaan dan implementasi program-program dan pelayanan sosial terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai suatu perusahaan secara individual.
2. *The Employer-Work Organization Service*, yaitu bantuan bagi manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dan pelayanan yang berhubungan dengan dunia kerja.
3. *The Consumer Service*, yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumen dari perusahaan. Bentuk pelayanan ini adalah pembelaan atas hak-hak konsumen untuk menerima pelayanan-pelayanan perusahaan yang berkualitas.
4. *Corporate Social Investment*, yaitu kepedulian perusahaan terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal diseperti perusahaan dengan memberikan investasi dalam program-program sosial perusahaan yang berkesinambungan.
5. *Work related Public Policy*, yaitu cakupan terhadap formulasi, identifikasi, analisis dan advokasi bagi kebijakan, program dan pelayanan-pelayanan pemerintah yang langsung maupun tidak mempengaruhi dunia kerja.